

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

NOTA DINAS

Nomor: AK.03/81/D.I.M.EKON.3/07/2026

Yth : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Dari : Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Asisten Deputi Pengembangan BUMN
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan II T.A 2026
Tanggal : 10 Juli 2026

Dalam rangka implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan II T.A 2026 untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Adapun dokumen pendukung Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat diakses pada tautan berikut: https://tr.ee/PBUMNESDM2026_LapkinTW2.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Asisten Deputi Pengembangan
BUMN Bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral



Gede Edy Prasetya
NIP 196906261994031002

Tembusan Yth.:
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang
Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan 2026	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1. Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</i>					
1.1	Indikator 1.1 Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Triliun	141,39	56,7	56,7	100
1.2	Indikator 1.2 Persentase penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Persen	80	30	30	100
II	<i>Sasaran Program 2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas</i>					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tepat Sasaran	Persen	80	40	40	100
2.2	Indikator 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Hilirisasi – Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 dan Fase 2, serta New Smelter Aluminium di Mempawah	Persen	80	40	40	100
2.3	Indikator 2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pengembangan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati	Persen	80	40	40	100
2.4	Indikator 2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Program Strategis BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Persen	80	40	40	100
III	<i>Sasaran Program 3. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas</i>					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,9 dai 4	120

	Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral					
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	92	46	46	100

Kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Program 1. Meningkatnya Produktivitas BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
----------	---

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produktivitas BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian indikator jumlah realisasi Belanja Modal (Capex) BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan Persentase Penyelesaian Penugasan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencapai target .

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Jumlah Realisasi

**Belanja Modal
BUMN Bidang
Energi dan Sumber
Daya Mineral**

Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran yang sangat krusial sebagai pilar utama dalam menjaga ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional. Dalam menjalankan fungsi strategis tersebut, investasi yang berkelanjutan melalui alokasi belanja modal (*capital expenditure*) menjadi motor penggerak utama untuk membangun serta memperbaiki infrastruktur vital, mulai dari eksplorasi sumber daya, pembangunan pembangkit listrik, hingga pengembangan jaringan distribusi. Optimalisasi penyerapan belanja modal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas operasional internal perusahaan, tetapi juga memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta pemerataan akses energi di seluruh wilayah Indonesia.

Belanja modal (*capital expenditure/capex*) merupakan indikator penting untuk menilai komitmen investasi BUMN dalam memperluas kapasitas usaha dan mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional. Tingkat realisasi *capex* mencerminkan efektivitas eksekusi program kerja dan keseriusan BUMN dalam berkontribusi terhadap prioritas pembangunan. Oleh karena itu, pengukuran atas persentase realisasi belanja modal menjadi relevan sebagai indikator kinerja utama bagi koordinasi Kemenko Perekonomian dalam mendorong akselerasi pertumbuhan sektor industri prioritas.

Upaya Pengembangan Usaha BUMN membutuhkan belanja modal (*capex*) yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendorong hal tersebut, dilakukan koordinasi dan monitoring pada BUMN bidang energi dan sumber daya mineral sehingga target realisasi belanja modal tahun 2026 sebesar Rp141,39 triliun berdasarkan *cascading* dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dapat tercapai.

BUMN bidang energi dan sumber daya mineral yang dikoordinasikan belanja modalnya yaitu pada BUMN yang memiliki kriteria diantaranya: merupakan BUMN dengan nilai aset besar dan kontribusi tinggi terhadap pendapatan negara, BUMN yang sudah tercatat di pasar modal (*go public*), BUMN sektor strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal, dan BUMN yang menerima PMN di tahun 2024 (sesuai UU nomor 19 tahun 2003). Rincian Holding BUMN yang dikoordinasikan antara lain:

- a. PT Pertamina (Persero) dengan target belanja modal sebesar Rp 68,23 Triliun
- b. PT PLN (Persero) dengan target belanja modal sebesar Rp 59,79 Triliun
- c. PT Mineral Industri Indonesia (Persero) dengan target belanja modal sebesar Rp 8,55 Triliun
- d. PT Pupuk Indonesia dengan target belanja modal sebesar Rp 4,82 Triliun

Dalam rangka memastikan bahwa investasi strategis tersebut berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang ESDM. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur komprehensif untuk mengevaluasi komitmen dan kemampuan BUMN sektor ESDM dalam mengeksekusi program-program kerja strategis yang telah direncanakan. Melalui pemantauan realisasi belanja modal ini, pemangku kepentingan dapat menilai tingkat keberhasilan implementasi proyek strategis nasional, modernisasi teknologi, serta kesiapan BUMN dalam mendukung transisi menuju energi bersih dan terbarukan sesuai dengan target jangka panjang pemerintah.

Untuk mencapai target realisasi *capex* BUMN bidang energi dan sumber daya mineral dilakukan melalui: kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi, dan penyusunan laporan dan/atau rekomendasi kebijakan pencapaian belanja modal BUMN bidang energi dan sumber daya mineral.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar Rp141,39 triliun dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada *cascading* dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Adapun target Triwulan II sebesar Rp 56,7 Triliun

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Belanja Modal (Capex) BUMN bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah terealisasi sebesar Rp56,7 triliun atau mencapai 100% dari target Triwulan II tahun 2026 sebesar Rp56,7 triliun dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencapai target	Triliun	56,7	56,7	100% (Memuaskan)

Belanja Modal (Capex) BUMN bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencapai target merupakan *cascading non direct* dari Indikator Belanja Modal Capex BUMN yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp141,39 Triliun. Sampai dengan laporan kinerja ini disusun, laporan Capex dari BUMN maupun BP BUMN untuk triwulan II belum tersedia sehingga realisasi yang disampaikan masih bersifat proyeksi. Proyeksi ini disusun salah satunya dengan mempergunakan data yang disampaikan oleh BUMN bidang ESDM (PT MIND-ID, PT Pertamina, PT PLN, dan PT Pupuk Indonesia) berdasarkan jawaban dari Surat B/BUM.02/3/D.I.M.EKON.3/01/2026 tanggal 7 Januari 2026.

Berdasarkan dokumen perencanaan strategis BUMN tahun 2026, perencanaan belanja modal BUMN diarahkan pada infrastruktur pendukung proses bisnis seperti pembangunan kilang, smelter dan lainnya. Pembangunan-pembangunan infrastruktur ini diharapkan mampu menjadi stimulus geliat bisnis konstruksi, besi baja dan lainnya.

Proyeksi Triwulan II 2026 ini didorong oleh koordinasi yang efektif antar *stakeholder* tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pada triwulan I 2025. Kinerja triwulan II yang cukup baik dan diprediksikan kinerja BUMN bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terkait belanja modal akan terus stabil sehingga target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencapai target			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Monitoring pencapaian belanja modal (<i>Capex</i>) BUMN bidang ESDM (PT MIND-ID, PT Pertamina, dan PT PLN) Triwulan I Tahun 2026	Terlaksana	1. Telah melaksanakan koordinasi secara berkelanjutan kepada BUMN bidang ESDM (PT MIND-ID, PT Pertamina, dan PT PLN) untuk memastikan realisasi belanja modal sesuai target dan mendukung percepatan program strategis BUMN bidang ESDM di Triwulan II.
2.	Koordinasi dan sinkronisasi pembiayaan pada	Terlaksana	1. Telah melaksanakan Rapat Pembahasan serta Kunjungan

	<i>Upgrading Existing/RDMP</i> Kilang		Lapangan Pengembangan Biorefinery Cilacap Phase 2 pada tanggal 25 Juni 2026 di Head Office PT Pertamina RU IV Cilacap. Kegiatan dipimpin oleh Asisten Deputi Pengembangan BUMN ESDM dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian ESDM, SKK Migas, PT Pertamina (Persero), PT PPN, PT PGN, dan PT Pertagas. Kesimpulan dan tindak lanjut dari kegiatan ini ialah: • Perlu disiapkan 2 (dua) skenario pemenuhan kebutuhan gas untuk RU Cilacap, yaitu skenario utilize alokasi gas dan skenario non-utilize alokasi gas. • Pemenuhan gas yang dibutuhkan RU Cilacap saat ini dapat diusulkan berasal dari rencana pembangunan pipa gas Tegal - Cilacap yang terkoneksi dengan pipa Cisem II • Diharapkan Pertamina RU Cilacap dapat menyiapkan kajian penyediaan gas beserta nilai keekonomiannya agar dapat didiskusikan lebih lanjut dengan KESDM dan Kemenkeu.
--	---	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Membuat bahan paparan target belanja modal PT MIND ID Triwulan II Tahun 2026
2. Membuat bahan paparan target belanja modal PT Pertamina Triwulan II Tahun 2026
3. Membuat bahan paparan target belanja modal PT PLN Triwulan II Tahun 2026
4. Membuat bahan paparan target belanja modal PT Pupuk Indonesia Triwulan II Tahun 2026
5. Penerbitan Surat Undangan Rapat Pembahasan Pengembangan Biorefinery Cilacap Phase 2 Nomor : BUM.02/60/D.I.M.EKON.3/06/2026 tanggal 17 Juni 2026.
6. Bahan paparan Rapat Pembahasan Pengembangan Biorefinery Cilacap Phase 2 yang dipergunakan tanggal 25 Juni 2026
7. Penerbitan Notulensi rapat mengenai Rapat Pembahasan Pengembangan Biorefinery Cilacap Phase 2 tertanggal 25 Juni 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dilaksanakannya rapat pembahasan di dalam kantor sehingga realisasi anggaran sampai dengan TW II sebesar Rp364.853.462 atau sebesar 56% dari pagu anggaran sebesar Rp653.329.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Dalam melakukan koordinasi awal untuk mengetahui target Capex BUMN bidang ESDM, terdapat BUMN yang kurang responsif dan tidak langsung memberikan informasi terkait hal tersebut.
2. Terdapat BUMN yang mau memberikan informasi target belanja modal (capex) namun memerlukan surat permintaan resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Lambatnya respon dari BUMN ataupun BP BUMN untuk memberikan data terkini realisasi Capex TW I Tahun 2026.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Membuat surat permintaan data target belanja modal (Capex) kepada BUMN bidang ESDM yang ditandatangani minimal di level eselon II.
2. Melakukan koordinasi dengan cara pendekatan persuasif dan berkelanjutan kepada tiap PIC masing-masing BUMN bidang ESDM, Kementerian/Lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi.
3. Optimalisasi sistem pendataan realisasi Capex secara triwulanan, termasuk validasi dan analisis tren pertumbuhan Capex berdasarkan sektor dan kelompok BUMN agar percepatan realisasi Capex menjadi lebih tepat sasaran.

1.2. Persentase penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disebutkan mengacu pada persentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang energi dan sumber daya mineral. Rincian dari penugasan yang menjadi dasar pada IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. PT Pertamina (Persero):

No.	Proyek/ Program	Pelaksana	Keterangan
1.	Penyediaan & Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)	Pertamina Patra Niaga	Penugasan <i>Public Service Obligation</i> (PSO) Pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat melalui penyediaan kuota JBT dan JBKP nasional yang bersubsidi/dikompensasi sesuai alokasi APBN.
2.	Penyediaan & Pendistribusian Isi Ulang LPG Tabung 3 kg	Pertamina Patra Niaga	Penugasan dari Pemerintah (Kementerian ESDM/BPH Migas) untuk memastikan kelancaran distribusi LPG bersubsidi secara tepat sasaran kepada masyarakat.
3.	Pembangunan Lembaga Penyalur BBM Satu Harga	Pertamina Patra Niaga	Program penugasan Pemerintah untuk mewujudkan keadilan energi dan penyamarataan harga BBM di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
4.	Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi Untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara	PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN)	Proyek penugasan untuk membangun jaringan gas kota (jargas) dan infrastruktur penyediaan energi bersih di wilayah IKN.
5.	Pengusahaan Panas Bumi di Wilayah Kerja Panas Bumi Kotamobagu	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE)	Penugasan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) panas bumi di WKP Kotamobagu, Sulawesi Utara, untuk mendukung transisi energi kelistrikan nasional.
6.	Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi	PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) & PT Pertamina Patra Niaga	Penugasan Pemerintah berdasarkan peta jalan (roadmap) pemanfaatan Bahan Bakar Gas (BBG/CNG) untuk transportasi guna menekan emisi dan impor BBM.

7.	Harga Gas Bumi Tertentu	PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN)	Kebijakan penugasan Pemerintah untuk menyediakan pasokan gas bumi dengan harga khusus bagi 7 sektor industri strategis guna mendukung daya saing industri nasional.
8.	Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM dan LPG	PT Pertamina Patra Niaga	Proyek peningkatan kapasitas infrastruktur hilir (Terminal BBM dan Terminal LPG) untuk memperkuat ketahanan stok energi nasional dan keandalan pasokan.
9.	<i>Upgrading Existing/Refinery Development Master Plan</i> (RDMP): RDMP Balongan, Dumai, Cilacap, Plaju dan Balikpapan	PT Kilang Pertamina Internasional (KPI)	Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk meningkatkan kapasitas pengolahan kilang, kompleksitas produk, dan standar kualitas bahan bakar hingga setara standar Euro V.
10.	Kilang Minyak Tuban (Ekspansi): GRR Tuban	PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) / PT Kilang Pertamina Internasional (KPI)	Proyek Strategis Nasional (PSN) Grass Root Refinery (GRR) berupa pembangunan kilang baru yang terintegrasi dengan kompleks petrokimia guna menekan impor BBM.
11.	Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi Rumah Tangga	PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN)	Program penugasan Pemerintah (Jargas Rumah Tangga) untuk menyediakan energi gas pipa yang bersih, murah, dan aman bagi masyarakat, serta menekan beban subsidi LPG 3 kg.

Penugasan Pemerintah kepada Pertamina yang telah mendapatkan persetujuan RUPS berlaku dan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penerima subsidi yang telah ditetapkan Pemerintah. Indikator penyelesaian penugasan tersebut adalah terimplementasinya penyaluran subsidi dimaksud kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan penerima subsidi sampai dengan jangka waktu penugasan selesai (periodik per tahun).

2. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero):

No.	Kategori/ Penugasan	Uraian Penugasan	Dasar Hukum Penugasan
-----	------------------------	------------------	--------------------------

1.	Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) yang terdiri dari pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya	PLN ditugaskan untuk melaksanakan berbagai proyek strategis nasional (PSN) di bidang ketenagalistrikan yang tercantum di dalam RUPTL 2025-2034. Program PIK ini mencakup total 4.118 proyek yang keseluruhannya berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional.	1. Peraturan Presiden No.89/2025 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK). 2. Peraturan Presiden No.109/2020 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.
2.	Pelaksanaan program subsidi dan kompensasi listrik	PLN ditugaskan untuk menyalurkan subsidi dan kompensasi dari pemerintah untuk menjamin ketersediaan akses listrik yang terjangkau. Hal ini dilakukan dengan memberikan tarif khusus bagi pelanggan rumah tangga miskin dan kelompok tertentu yang berhak menerima subsidi guna mengurangi beban hidup rakyat kecil.	1. RUPTL PLN 2025–2034. 2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 315.K/TL.03/MEM .L/2025 tanggal 19 September 2025. 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016. 4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018. 5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2025. 6. Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2025.
3.	Pemenuhan kebutuhan listrik nasional yang terdiri dari program listrik pedesaan (Lisdes), program bantuan pasang baru listrik (BPBL) dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTs)	1. Lisdes: Mempercepat pemerataan akses energi listrik dan mendukung pencapaian Rasio Elektrifikasi (RE) hingga 100% khususnya di wilayah 3T. 2. BPBL: Memastikan percepatan akses tenaga listrik bagi rumah tangga miskin	

		di daerah pedesaan dan tertinggal. Penerima manfaat dapat langsung menggunakan listrik tanpa menanggung biaya awal. 3. PLTSa: PLN ditugaskan sebagai pihak <i>off taker</i> wajib yang bertanggung jawab menandatangani Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dan/atau membeli listrik dari pembangkit berbasis sampah	
--	--	--	--

Untuk mencapai target penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang energi dan sumber daya mineral ini akan dilakukan melalui: kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan penyusunan laporan dan/atau rekomendasi kebijakan penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang energi dan sumber daya mineral. Indikator penyelesaian penugasan nomor 1 dan 2 adalah terimplementasinya penugasan pemerintah tersebut sesuai dengan jangka waktu penugasan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80% dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada *cascading* dalam Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Adapun target Triwulan II adalah sebesar 30%. Pemilihan pemecahan target triwulanan ini didasari oleh rencana pemecahan permasalahan dan kendala yang dihadapi pada tiap triwulan. Hingga Triwulan II Tahun 2026, Penyelesaian Penugasan Pemerintah BUMN bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencapai target yang telah terealisasi adalah sebesar 30% atau mencapai 100% dari target Triwulan II Tahun 2026 sebesar 30% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Persentase penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Persen	30	30	100% (Memuaskan)

Pada Triwulan II, indikator Penyelesaian Penugasan BUMN Bidang ESDM memiliki target sebesar 30%, dan telah berhasil direalisasikan sebesar 30%, atau setara dengan 100% dari target Triwulan II tahun 2026.

Capaian ini merepresentasikan akselerasi strategis BUMN sektor energi, khususnya pada aspek penyelesaian studi kelayakan proyek energi terbarukan dan pengembangan infrastruktur distribusi energi nasional. Aspek akuntabilitas dari kinerja ini dikonfirmasi melalui pelaporan berkala BUMN pelaksana, kesepakatan formal dalam risalah rapat koordinasi lintas sektoral, serta tinjauan teknis dari instansi pembina terkait.

Implikasi positif dari keberhasilan ini adalah menguatnya pemenuhan kebutuhan energi di wilayah terpencil serta terwujudnya percepatan transisi energi, yang merefleksikan efisiensi mekanisme koordinasi penugasan.

Menuju triwulan berikutnya, tren realisasi kinerja dipastikan tetap berada pada jalur yang tepat. Mempertimbangkan capaian awal yang berada di atas target, indikator ini optimis dapat melampaui target kumulatif tahunan dan memperkuat posisi BUMN sebagai pilar utama program strategis nasional di bidang ESDM.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat koordinasi secara berkelanjutan dengan PT Pertamina (persero) penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP dengan hasil sebagai berikut: a. Harga BBM jenis JBT (Jenis BBM Tertentu) dan JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan) ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan PT Pertamina (Persero) menetapkan harga BBM jenis umum (JBU)

			seperti Pertamina Series dan Dex Series. b. Penetapan harga BBM nonsubsidi disesuaikan oleh Pertamina secara berkala, umumnya setiap tanggal 1 bulan berjalan yang dihitung dari tanggal 25 pada dua bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 bulan sebelumnya dan formulanya mengacu pada Keputusan Menteri ESDM tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum, sehingga tidak dapat secara langsung mengikuti dinamika harga pasar minyak harian. c. Ketegangan geopolitik global, khususnya di kawasan strategis seperti Selat Hormuz, mendorong kenaikan harga crude oil yang berdampak pada peningkatan harga BBM. Sehubungan dengan hal tersebut, kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi mendorong peralihan konsumsi ke BBM subsidi, sehingga dapat meningkatkan beban anggaran subsidi. d. PT Pertamina (Persero) telah menempuh berbagai langkah strategis guna menjaga keamanan stok BBM dan LPG dalam negeri di tengah kondisi konflik di wilayah Selat Hormuz, melalui pendampingan Kejaksaan Agung dan KPK serta koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Sehubungan
--	--	--	--

			dengan hal tersebut, Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan penuh dalam pengadaan stok BBM dan LPG. e. Secara umum, kondisi stok BBM dan LPG saat ini dalam kondisi aman dan distribusi dalam keadaan lancar, dengan rincian sebagai berikut: Pertalite sebesar 19,3 hari, Pertamina 21,3 hari, Pertamina Turbo 31,2 hari, Solar 14,4 hari, Dex 53,5 hari, Avtur 27,6 hari, dan LPG 10,7 hari. f. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi nasional, PT Pertamina (Persero) membutuhkan pasokan crude oil sebesar 3,6 juta barel per bulan yang bersumber dari wilayah Selat Hormuz. Sehubungan dengan terhambatnya distribusi minyak di wilayah tersebut, harga crude oil jenis Brent saat ini berada di atas USD100 per barrel. g. Selanjutnya, untuk memenuhi stok BBM domestik, PT Pertamina (Persero) melakukan impor. Sumber impor tidak terbatas dari Singapura, melainkan disesuaikan dengan ketersediaan pasokan di pasar global, mengingat kondisi pasokan yang saat ini terbatas. h. Telah dilaksanakan pertemuan intensif terkait pengadaan crude, termasuk keterlibatan pasar spot dari Singapura. Sebagai langkah antisipasi keterlambatan, dilakukan empat kali
--	--	--	---

			proses pengadaan/lelang untuk mendukung pasokan LPG pada akhir Maret. Hingga periode Maret–April, terdapat satu penawaran yang masuk namun belum memenuhi kriteria. Pada bulan April juga dilaksanakan tender untuk menyeimbangkan kargo bulan Maret sebagai dampak kondisi force majeure sebelumnya. i. Proyeksi ketersediaan Gasoline hingga periode Mei–Juni telah dalam kondisi aman (secure). Untuk periode Juli–Desember, strategi pengadaan akan dilakukan secara kuartalan. Sumber pasokan tidak hanya berasal dari kawasan Singapura dan Malaysia, namun juga akan diperluas ke sumber di luar kawasan Selat (non-straits) guna meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pasokan.
2	Koordinasi dan Sinkronisasi penyelesaian pembangunan Kilang <i>Existing</i> /RDMP	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat koordinasi serta kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan <i>green refinery</i> Cilacap <i>phase 2</i> pada tanggal 25 Juni 2026 di <i>Head Office Refinery Unit (RU)</i> Cilacap. dengan hasil sebagai berikut: a. Kilang RU Cilacap merupakan unit pengolahan minyak terbesar dan produsen avtur tertinggi di Indonesia dengan kapasitas pengolahan sebesar 348 ribu barel

			per hari atau 31 % dari kapasitas kilang nasional. Kilang ini dibangun pada tahun 1976 di area seluas 200 Ha yang hingga saat ini terus dilakukan pengembangan salah satunya adanya pembangunan <i>green refinery</i>. <i>Green Refinery Phase-1</i> sebelumnya telah mulai tahun 2021 melalui pembangunan <i>Revamping</i> unit TDHT (<i>Treated Distillate Hydrotreater</i>) di RU IV Cilacap. Proyek ini berhasil mengolah <i>Used Cooking Oil</i> (UCO) atau minyak jelantah menjadi bahan bakar ramah lingkungan seperti <i>Sustainable Aviation Fuel</i> (SAF). Dalam rangka mendukung ketahanan energi melalui pemanfaatan UCO dari dalam negeri, PT. Pertamina Patra Niaga akan membangun <i>green refinery Cilacap phase-2</i> dengan nilai investasi sebesar 1,1 miliar USD yang ditargetkan <i>onstream</i> Agustus 2029; b. Proyek <i>green refinery Cilacap phase-2</i> dengan kapasitas produksi 6.000 barrel per hari dapat memproduksi SAF sebesar 5487 barrel/hari atau HVO sebesar 5414 barrel/hari baik untuk memenuhi kebutuhan domestik
--	--	--	--

			maupun ekspor. Proyek ini telah memasuki tahap persiapan investasi dengan kemajuan pada aspek FID, EPC, kemitraan, <i>feedstock</i>, dan pemasaran. Namun, keberhasilan implementasi pengembangan proyek sangat bergantung pada penyelesaian isu ketersediaan pasokan gas sebesar 6,5 MMSCFD yang menjadi faktor kritis sebelum proyek dapat memasuki tahap konstruksi dan operasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya percepatan pengembangan <i>green refinery</i> Cilacap <i>phase-2</i> ini. c. Saat ini, komponen terbesar dalam biaya produksi pengolahan kilang adalah <i>refinery fuel gas</i> dan <i>refinery fuel oil</i> yang mencapai hingga 56% dari total biaya produksi digunakan sebagai bahan bakar. Sehubungan dengan hal tersebut, <i>Refinery Unit</i> Cilacap merencanakan substitusi ke <i>natural gas</i> sehingga bahan baku yang sebelumnya digunakan untuk pembakaran dapat dikonversi menjadi produk yang dapat meningkatkan keekonomian kilang
--	--	--	---

			dengan potensi penghematan sebesar 5,9 juta USD per tahun. Dengan penggunaan <i>natural gas</i>, <i>refinery fuel oil</i> yang sebelumnya digunakan sebagai bahan bakar dapat dialihkan menjadi <i>feedstock</i> RFCC sehingga menghasilkan produk bernilai tambah seperti <i>gasoline</i>, LPG, <i>propylene</i>, dan produk petrokimia lainnya. Untuk mendukung rencana tersebut, maka dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana penerimaan gas eksternal dan ditargetkan selesai bulan Desember 2026. d. RU Cilacap mulai berfokus untuk memproduksi dan mengolah HVO maupun SAF sejak tahun 2021 dan memulai <i>commercial flight test</i> pada tahun 2023. Tidak hanya SAF, RU Cilacap juga sedang mengembangkan UCO melalui <i>plant test co-processing</i> dengan target uji coba hasilnya pada Agustus 2026. Diperlukan kepastian ketersediaan pasokan dan kestabilan harga UCO sebagai bahan baku <i>kilang green refinery phase-2</i>. Untuk menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku UCO, diperlukan
--	--	--	--

			dukungan kebijakan berupa pembatasan ekspor UCO agar pasokan dalam negeri lebih terjamin, asosiasi pengumpul UCO dapat berkembang, serta harga bahan baku menjadi lebih kompetitif. e. Dengan adanya kilang RU Cilacap melalui pengembangan <i>green refinery</i> diharapkan dapat memenuhi kebutuhan SAF dan HVO.
3.	Koordinasi dan sinkronisasi percepatan penyelesaian pembangunan Kilang Minyak Tuban (GRR Tuban)	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tentang potensi kerjasama ekonomi antara Rusia dengan Indonesia khususnya dalam rangka mendorong potensi pembiayaan proyek GRR Tuban pada tanggal 26 Mei 2026 dengan hasil sebagai berikut: a. Duta Besar RI Moskow menyampaikan permohonan dukungan kepada Menko Perekonomian melalui surat tertanggal 21 April 2026 terkait rencana kunjungan kerja <i>Credit Europe Bank</i> (CEB) ke Indonesia guna membahas potensi kerjasama ekonomi antara Rusia dengan Indonesia, termasuk untuk mengatasi masalah/kendala pembayaran luar negeri antara Rusia-Indonesia b. Permasalahan transaksi pembayaran

			antara Rusia dengan Indonesia sejak Oktober 2025 akibat penjatuhan sanksi kepada Rusia berdampak pada terhentinya <i>capital injection</i> pembiayaan proyek GRR Tuban yang merupakan proyek <i>joint venture</i> antara Pertamina dengan Rosneft. Oleh karena itu, rencana kunjungan kerja CEB ke Indonesia diharapkan dapat membuka peluang alternatif transaksi pembayaran pembiayaan proyek guna keberlanjutan GRR Tuban. c. Presiden Direktur PT PRPP menyampaikan bahwa hingga saat ini proyek GRR Tuban masih dalam proses <i>final investment decision</i> (FID) dan mengalami kendala terutama mengenai struktur pembiayaan proyek. Saat ini, PT PRPP sedang mencoba menerapkan struktur pembiayaan menggunakan kombinasi antara modal (<i>equity</i>) dari para pemegang saham dan pendanaan dari eksternal (<i>project financing</i>). Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan opsi-opsi pembiayaan proyek salah satunya melalui kerjasama antara Rusia-Indonesia. d. PT Mandiri Sekuritas menyampaikan bahwa saat ini hanya bank-bank <i>medium</i>
--	--	--	---

			size saja dan memiliki afiliasi dengan China maupun Turki yang dapat melakukan transaksi dengan Rusia. e. Kedutaan Besar RI di Moskow menyampaikan <i>concern</i> Presiden RI dalam kunjungan tanggal 13 April 2026 ke Rusia adalah pemenuhan energi nasional khususnya dari Rusia, salah satunya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam transaksi maupun investasi perdagangan dan pemenuhan energi. Hal ini ditindaklanjuti dengan Sidang Komisi Bersama untuk bidang ekonomi tanggal 12 Mei 2026 di Kazan yang dihadiri oleh Menko Perekonomian menyimpulkan bahwa dibutuhkan penyelesaian hambatan perdagangan energi terutama Blok Tuna dan GRR Tuban. f. Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri pada prinsipnya juga menyampaikan perlunya dukungan langkah-langkah penyelesaian kendala proyek ini sebagai PSN dan Kementerian Luar Negeri siap membantu dalam pendekatan <i>G to G</i>. g. Direktorat Hubungan Kerjasama Internasional OJK menyampaikan bahwa
--	--	--	---

			pada tanggal 29 Mei 2026 sudah melakukan pertemuan dengan <i>central bank</i> Rusia yang pada intinya meminta kejelasan <i>payment settlement</i> diantara kedua negara. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, opsi yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan saat ini yaitu transaksi menggunakan mata uang Renminbi melalui mekanisme <i>money remittance</i> dengan bank China yang ada di Rusia (ICBC dan BoC) Adapun terdapat batasan jumlah dana yang dapat ditransaksikan antara Rusia-Indonesia yaitu maksimal 300 juta USD/transaksi, namun hal ini bisa ditangani dengan cara menunjuk BOC sebagai <i>Renminbi kliring bank</i> sehingga BOC bisa menarik seluruh cadangan <i>Renminbi</i> di dunia. Sementara itu, untuk ICBC berdasarkan informasi dari Kedutaan Besar Rusia di Indonesia sudah tidak dimungkinkan lagi dijadikan mitra dikarenakan mandat untuk pihak ICBC hanya diperbolehkan bertransaksi untuk Rusia-China saja. Adapun opsi lainnya yaitu pembukaan bank korespondensi yang menjadi ranah wewenang Direktorat Perizinan Perbankan OJK.
--	--	--	--

			h. Direktorat Perizinan Perbankan OJK pada prinsipnya mendukung keputusan dari pemerintah yang nanti akan ditetapkan mengenai skema pembiayaan proyek ini, termasuk jika diperlukan akuisisi bank. OJK juga telah melakukan pertemuan dengan CEB yang menargetkan bank BUMN untuk diakuisisi, namun hal ini tidak memungkinkan karena bank BUMN di Indonesia masuk kategori buku IV. Berdasarkan ketentuan POJK yang berlaku, ada batasan-batasan tertentu kepemilikan saham untuk pelaksanaan akuisisi bank-bank kecil. Adapun hingga saat ini belum ditentukan calon bank mana saja yang akan diakuisisi, hal ini mengingat perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan pengawas bank. i PT Pertamina mengharapkan adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia untuk bisa menunjuk 2 (dua) bank sebagai <i>designated bank</i> yang memang diperuntukkan khusus membantu Pertamina dalam bertransaksi dengan Rusia. Selain itu, Pertamina juga mengharapkan adanya <i>guarantee</i> pemerintah dan pihak
--	--	--	--

			yang bisa membail-out Pertamina sebagai antisipasi jika ke depannya Pertamina dianggap/dinilai melanggar ketentuan yang berpotensi dikenai sanksi. j. Departemen Internasional Bank Indonesia menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa menunjuk bank tertentu untuk melakukan transaksi dengan Rusia. Adapun opsi kerjasama yang saat ini sedang dijajaki oleh Bank Indonesia yaitu menggunakan platform LCT (<i>local currency transaction</i>) antara Indonesia – Rusia melalui China serta rencana <i>Renminbi kliring bank</i>, namun tetap perlu diperhatikan prinsip-prinsip KYC (<i>know your customer</i>) dimana entitas yang terlibat dalam transaksi harus terbebas dari sanksi. Bank Indonesia ke depannya juga akan menyelenggarakan pertemuan dengan bank sentral Rusia di Moskow pada bulan Juli 2026 untuk menjajaki rencana kerjasama ini lebih lanjut. k. Berkaitan dengan hal ini, terdapat beberapa negara yang pernah melakukan kerjasama pembiayaan dengan Rusia melalui cara pendirian bank baru/ bank <i>dedicated</i> untuk transaksi dengan Rusia yang diinisiasi
--	--	--	---

			oleh pemerintahnya khusus untuk transaksi perdagangan bilateral kedua negara seperti India, Turki, dan Filipina. Hal ini dapat dijadikan <i>benchmarking</i> bagi Indonesia dalam mencari opsi kerjasama pembiayaan untuk perdagangan dengan Rusia. l Opsi untuk dukungan pembiayaan proyek jangka menengah bisa dilakukan melalui skema kerjasama LCT antara Indonesia – Rusia melalui China dan rencana <i>Renminbi kliring bank</i> yang tengah dijajaki oleh Bank Indonesia. m Pilihan opsi pembiayaan jangka panjangnya yaitu Direktorat Perizinan Perbankan OJK bersama dengan pengawas bank akan menyiapkan calon bank-bank di Indonesia yang dapat diakuisisi oleh CEB untuk mendukung alternatif pembiayaan antara Indonesia-Rusia termasuk proyek GRR Tuban ke depannya. n Adanya usulan pendirian bank baru/bank <i>dedicated</i> untuk mendukung transaksi pembayaran maupun kerjasama pembiayaan dalam perdagangan antara Indonesia-Rusia masih perlu didiskusikan lebih lanjut melalui <i>benchmarking</i> dengan
--	--	--	---

			KBRI di India, KBRI di Turki, KBRI di Filipina maupun KBRI di Rusia.
4.	Koordinasi dan sinkronisasi percepatan penyelesaian kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu	Terlaksana	Telah dilaksanakan Kunjungan Kerja dan Peninjauan Lapangan <i>Pilot Project</i> Jaringan Gas Bumi untuk sektor rumah tangga dan industri di Kota Batam pada 16 April 2026 dengan hasil sebagai berikut: • <i>Pilot Project</i> di kota Batam menjadi proyek percontohan karena infrastrukturnya yang sudah cukup masif tersambung ke area perumahan sejak tahun 2014 sebelum adanya program dari APBN (masyarakat sudah cenderung terimplementasikan jargas ini sebelumnya). Hingga saat ini sudah terpasang 6.900 Sambungan Rumah (SR) dari potensi 113.000 SR. • Terkait dengan minat masyarakat, hingga saat ini sudah teridentifikasi sekitar 15.000 rumah tangga yang berminat untuk dilakukan penyambungan Jargas baru. Tantangan teknis untuk saat ini adalah untuk penyediaan Jargas di pemukiman padat penduduk, dimana terdapat risiko utilitas (kabel listrik, pipa air, dan fiber optik). Namun, PGN telah

			menyiapkan mitigasi risiko. Pengembangan jargas di Batam akan dijadikan sebagai <i>benchmarking</i> dalam pengembangan Jargas di wilayah padat penduduk seperti di Pulau Jawa. • Harga Jargas APBN sekitar Rp5.600 dan harga Gas Kita (PGN) sekitar Rp13.200, sedangkan harga keekonomiannya sekitar Rp18.000 s.d. Rp20.000. Gap harga yang cukup signifikan ini mempengaruhi pertumbuhan penggunaan jargas rumah tangga (daya beli masyarakat). Diperlukan transformasi untuk program jargas agar implementasi jargas ini dapat diterima oleh masyarakat luas secara nasional.
5.	Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) yang terdiri dari pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Transformasi PLTD dan Program <i>Accelerated Renewable Energy Development</i> (ARED) yang diselenggarakan di Kemenko Perekonomian pada 1 April 2026, dengan ini hasil sebagai berikut: a. Upaya pengurangan penggunaan BBM oleh PLN di sektor ketenagalistrikan dilakukan melalui program <i>Accelerated Renewable Energy Development</i> (ARED) yang tertuang dalam RUPTL 2025–2034 dengan fokus pada

			pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Dalam perencanaan jangka panjang tersebut, PLN menargetkan penurunan penggunaan BBM hingga 91% atau setara 3,8 juta liter. Selain itu, atas arahan Presiden, PLN melakukan percepatan melalui program pengembangan PLTS 100 GW, sehingga pada tahun 2028–2029 diharapkan penggunaan BBM pada pembangkit dapat dieliminasi sepenuhnya dan digantikan oleh PLTS dan BESS hingga mencapai 100% atau setara 4,2 juta liter. b. Upaya eliminasi pembangkit berbasis BBM (PLTD) dilakukan di 1.354 lokasi melalui tiga program utama, yaitu konversi ke EBT (PLTS + BESS) sebanyak 199 proyek di 741 lokasi dengan kapasitas 1.076 MW digantikan dengan PLTS sebesar 3,21 GWp dan BESS 9,03 GWh, gasifikasi sebanyak 54 proyek di 54 lokasi untuk wilayah <i>isolated</i>, serta interkoneksi pada sistem besar sebanyak 65 proyek di 558 lokasi. c. Dalam pengembangan kapasitas pembangkit, dari total rencana 100 GW, saat ini baru sekitar 17 GW yang telah tercantum dalam RUPTL, sehingga diperlukan dukungan pemerintah antara lain: • Insentif untuk menurunkan harga
--	--	--	--

			PLTS dan BESS dalam bentuk relaksasi TKDN, keringanan PPN, PPh, dan Bea Masuk. • Penyediaan lahan PLTS termasuk pemanfaatan pemanfaatan waduk PU, lahan eks tambang, lahan yang dikuasai pemerintah/BUMN maupun lahan produktif lain. • Fasilitas pembiayaan berbunga rendah untuk menurunkan risiko proyek sehingga dapat menekan <i>cost of fund</i>. • Regulasi Khusus setingkat Perpres sebagai payung kebijakan PLTS 100 GW, termasuk penyesuaian KEN, RUKN, RUPTL, dan aturan BESS. Dengan dukungan tersebut, tarif LCOE (<i>Levelized Cost of Energy</i>) PLTS berpotensi dapat ditekan hingga mendekati 2,85 cUSD/kWh. d. Dari sisi pembiayaan, sekitar 75% pengembangan pembangkit dilakukan melalui skema pihak ketiga yaitu IPP (<i>Independent Power Producer</i>) dengan PLN sebagai <i>oftaker</i>. Penetapan tarif masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022, namun implementasinya dinilai kurang menarik bagi investor. Saat ini regulasi turunan berupa
--	--	--	---

			Kepmen ESDM terkait skema tarif pembelian listrik berbasis hybrid (PLTS + BESS) masih dalam proses penyusunan. e. Dalam rangka akselerasi pengurangan konsumsi BBM di tengah dinamika global, PLN juga mengoptimalkan pemanfaatan pembangkit eksisting berbasis energi domestik, khususnya batubara, dengan dukungan Kementerian ESDM untuk memastikan ketersediaan pasokan. Selain itu, PLN juga tengah melakukan inovasi melalui peningkatan pencampuran biodiesel dari B40 menuju B50, dengan hasil uji coba awal menunjukkan tidak adanya kendala teknis pada mesin maupun sistem penyimpanan. f. Staf Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden turut menyampaikan pandangan bahwa pengurangan ketergantungan terhadap BBM dapat dilakukan melalui diversifikasi energi, antara lain: • Peningkatan pemanfaatan batubara dalam jangka pendek (peningkatan 10% batubara berpotensi menurunkan konsumsi BBM hingga 30%), • Optimalisasi penggunaan gas
--	--	--	---

			melalui jaringan gas kota dan <i>compressed natural gas</i> (CNG), • Percepatan pengembangan bioetanol yang saat ini pemnafaatannya masih sekitar 4% dari kapasitas, serta • Akselerasi pembangunan PLTS 100 GW dengan memanfaatkan infrastruktur eksisting, khususnya pada lokasi PLTD, sehingga dapat dipercepat dalam waktu sekitar 3–6 bulan. g. Simpulan dan tindak lanjut: • Upaya pengurangan penggunaan BBM di sektor ketenagalistrikan oleh PLN telah memiliki arah yang jelas melalui program ARED, dengan target eliminasi penuh penggunaan BBM pada pembangkit pada tahun 2028–2029 melalui pengembangan PLTS + BESS dalam program 100 GW. Transformasi PLTD dilaksanakan secara terstruktur melalui tiga pendekatan utama, yaitu konversi ke EBT, gasifikasi, dan interkoneksi. Dalam jangka pendek, akselerasi
--	--	--	---

			difokuskan pada optimalisasi energi domestik yang mampu menekan konsumsi BBM, seperti pemanfaatan batubara serta percepatan pengembangan PLTS dengan memanfaatkan infrastruktur eksisting sebagai strategi kunci untuk mendukung transisi energi yang cepat dan efisien. • Namun demikian, percepatan implementasi masih memerlukan dukungan pemerintah, baik dalam bentuk insentif, penyediaan lahan (termasuk lahan bekas tambang dan aset negara yang tidak terpakai), fasilitas pembiayaan, dan regulasi khusus sebagai payung kebijakan. Dari sisi pembiayaan, diperlukan regulasi turunan berupa Kepmen untuk mendukung skema tarif yang lebih kompetitif, serta fleksibilitas dalam penyesuaian RKAP agar responsif terhadap dinamika dan menghindari keterlambatan program strategis. Selain itu, penguatan kebijakan <i>Domestic Market Obligation</i> (DMO) batubara, termasuk
--	--	--	---

			pengetatan sanksi bagi pelaku usaha yang mengekspor batubara, menjadi penting untuk menjamin kecukupan pasokan energi primer bagi pembangkit dalam negeri.
--	--	--	--

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dilaksanakannya rapat pembahasan di dalam kantor sehingga realisasi anggaran sampai dengan TW II sebesar Rp364.853.462 atau sebesar 56% dari pagu anggaran sebesar Rp653.329.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Proses koordinasi awal untuk menghimpun data target dan realisasi berjalan lambat karena beberapa BUMN kurang responsif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.
2. Terdapat beberapa BUMN yang bersikap kooperatif, namun mensyaratkan adanya legalitas permohonan data melalui surat dinas resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan mendatang agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Menerbitkan surat resmi permintaan data target dan realisasi penugasan pemerintah kepada seluruh BUMN bidang ESDM terkait, dengan penandatanganan minimal di tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II).
2. Membangun hubungan kerja yang lebih erat melalui pendekatan persuasif, personal, dan berkelanjutan langsung kepada para PIC di masing-masing BUMN ESDM demi mempercepat alur pertukaran informasi.

2

Sasaran Program 2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Produktivitas BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian indikator yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tepat Sasaran;
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Hilirisasi – Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 dan Fase 2, serta New Smelter Aluminium di Mempawah;

3. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pengembangan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati;
4. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Program Strategis BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tepat Sasaran

Latar Belakang

Penegakan kebijakan subsidi BBM agar tepat sasaran merupakan langkah strategis untuk menjaga efektivitas belanja negara, memperkuat ketahanan fiskal, serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Dari sisi ekonomi, penyaluran subsidi yang tepat sasaran akan mengurangi kebocoran anggaran, meningkatkan efisiensi penggunaan APBN, serta memastikan manfaat subsidi diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Sementara itu, dari sisi bisnis, pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan subsidi akan menciptakan persaingan usaha yang lebih adil, mencegah praktik penyelewengan dan penyelundupan, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan. Dengan demikian, subsidi energi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, tetapi juga menjadi pendorong stabilitas ekonomi dan peningkatan daya saing nasional .

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan penyaluran subsidi BBM yang lebih tepat sasaran sebagai bagian dari reformasi tata kelola subsidi energi. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan bahwa manfaat subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Berbagai langkah yang telah dilakukan meliputi penguatan regulasi, digitalisasi sistem distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi, penyempurnaan basis data penerima subsidi, integrasi data antar-kementerian/lembaga, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan subsidi. Asisten Deputi Pengembangan BUMN bidang ESDM berkomitmen dan konsisten melakukan koordinasi dengan K/L dan badan usaha terkait dalam upaya penertiban program subsidi BBM tepat sasaran..

Adapun tujuan kebijakan pengendalian subsidi BBM tepat sasaran antara lain:

- Menjamin subsidi BBM tepat sasaran dengan memastikan penyalurannya hanya kepada masyarakat dan sektor yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara melalui pengurangan kebocoran dan penyalahgunaan subsidi sehingga manfaatnya dapat dioptimalkan bagi kepentingan publik.
- Memperkuat tata kelola dan ketahanan energi nasional melalui pengawasan yang lebih baik, penegakan hukum yang tegas, serta distribusi BBM bersubsidi yang lebih transparan dan akuntabel

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Bahan terkait Pengendalian Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tepat Sasaran.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80% dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN Bidang ESDM yang diperoleh melalui penilaian 1 (satu) tahap dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses. Adapun target Triwulan II sebesar 40%.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tepat Sasaran . Dalam Rangka pengendalian subsidi BBM tepat sasaran telah terealisasi sebesar 40 atau mencapai 100% dari target Triwulan II Tahun 2026 sebesar 40% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1. IKU-2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tepat Sasaran	Persen	40	40	100% (Memuaskan)

Triwulan II indikator Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tepat Sasaran memiliki target sebesar 40% dan telah berhasil direalisasikan sebesar 40%, atau setara dengan 100% dari target triwulan II tahun 2026. Capaian ini merupakan upaya Asdep Pengembangan BUMN Bidang ESDM dalam mendukung tertibnya program subsidi BBM tepat sasaran, dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan/hal-hal apa saja yang menjadi perhatian dan tantangan dari K/L dan BUMN yang kemudian akan dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pengambil kebijakan. Identifikasi permasalahan dilakukan dengan mengadakan rapat pembahasan dengan K/L, BUMN, dan perusahaan swasta yang berkaitan dengan penyaluran BBM bersubsidi. Juga dilakukan koordinasi yang intensif dengan instansi Aparat Penegak Hukum agar penertiban subsidi BBM tepat sasaran dapat ditegakkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tepat Sasaran			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan

1.	Finalisasi regulasi Komunikasi dan edukasi kepada publik	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan Rapat Rapat Pembahasan Crisis Management Action - Subsidi Tepat Sasaran, pada tanggal 28 April 2026. Sehubungan dengan upaya penertiban dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk potensi penyelundupan akibat disparitas harga dengan negara tetangga, dipandang perlu untuk memperkuat langkah-langkah pengawasan dan pengendalian. Hal ini menjadi semakin krusial dalam rangka mendukung penghematan APBN, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang, khususnya eskalasi konflik antara Amerika Serikat/Israel dan Iran, yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia serta berdampak pada ketahanan pasokan BBM dan LPG nasional. Oleh karena itu, rapat ini diselenggarakan sebagai forum koordinasi dan pembahasan langkah strategis guna mengantisipasi berbagai risiko tersebut. 2. Telah dilaksanakan Rapat Rapat Pembahasan Crisis Management Action - Subsidi Tepat Sasaran, pada tanggal 21 Mei 2026. Rapat ini merupakan pembahasan lanjutan dari rapat 28
----	--	------------	--

			April 2026. Adapun pada rapat kali ini telah dibahas beberapa isu, antarlain: (a) Kebocoran subsidi BBM dan LPG terjadi akibat kombinasi tingginya selisih harga, lemahnya verifikasi data, keterbatasan pengawasan lapangan, dan modus penyalahgunaan yang terus berkembang. (b). Oleh karena itu, tindak lanjut yang menjadi prioritas adalah penguatan integrasi data lintas instansi, pembentukan satgas terpadu, pengetatan verifikasi penerima manfaat, pengawasan berbasis digital, serta percepatan revisi regulasi guna memastikan subsidi lebih tepat sasaran dan memiliki dasar hukum yang jelas
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Surat Asisten Deputi Pengembangan BUMN bidang ESDM Nomor: Nomor: B/BUM.02/31/D.I.M.EKON.3/05/2026 tentang Notulen Rapat Pembahasan CMA- Subsidi Tepat Sasaran.
2. Nota Dinas Asisten Deputi Pengembangan BUMN bidang ESDM Nomor: BUM.02/67/D.I.M.EKON.3/06/2026 tentang Laporan Hasil Rapat Pembahasan Crisis Management Action - Subsidi Tepat Sasaran

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dilaksanakannya rapat pembahasan di dalam kantor sehingga realisasi anggaran sampai dengan TW II sebesar Rp198.210.974 atau sebesar 68% dari pagu anggaran sebesar Rp290.915.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Masih diperlukan koordinasi dengan instansi terkait penegakkan hukum dan penertiban penyaluran BBM subsidi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Tim teknis dari Asisten Deputi Pengembangan BUMN bidang ESDM terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait penegakkan hukum dan penertiban penyaluran BBM subsidi.

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Hilirisasi – Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 dan Fase 2, serta New Smelter Aluminium di Mempawah

Latar Belakang

Hilirisasi sumber daya alam merupakan salah satu program prioritas Pemerintah dalam rangka meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri, memperkuat struktur industri nasional, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung kemandirian industri strategis. Sebagai tindak lanjut kebijakan pelarangan ekspor bijih bauksit, Pemerintah mendorong percepatan pembangunan industri pengolahan bauksit menjadi alumina dan aluminium di dalam negeri. Salah satu proyek strategis tersebut adalah pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah yang merupakan kerja sama antara PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM). Selain penyelesaian SGAR Fase 1, pemerintah juga mendorong pengembangan SGAR Fase 2 serta pembangunan New Smelter Aluminium di Mempawah guna memperkuat ekosistem hilirisasi bauksit yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah isu strategis yang memerlukan penyelesaian melalui koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan pemangku kepentingan terkait. Beberapa isu tersebut antara lain penyelesaian tumpang tindih lahan proyek, pengembangan infrastruktur logistik melalui Pelabuhan Kijing, penyediaan lahan untuk landfill area dan hauling road, dukungan perizinan dan tata ruang, serta kesiapan infrastruktur pendukung untuk pengembangan SGAR Fase 2 dan New Smelter Aluminium. Penyelesaian berbagai isu tersebut menjadi faktor penting dalam menjamin keberlanjutan operasional proyek serta mendukung peningkatan kapasitas industri aluminium nasional.

Untuk mendukung percepatan hilirisasi bauksit, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian melalui penyelenggaraan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan strategis bersama Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak terkait. Koordinasi tersebut difokuskan pada percepatan penyelesaian isu lintas sektor, penelarasan kebijakan, serta pemantauan tindak lanjut hasil rapat guna memastikan kelancaran pelaksanaan SGAR Fase 1, pengembangan SGAR Fase 2, dan pembangunan New Smelter Aluminium di Mempawah.

Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan fungsi koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung percepatan penyelesaian isu strategis serta implementasi kebijakan hilirisasi bauksit melalui pengembangan SGAR Fase 1, SGAR Fase 2, dan New Smelter Aluminium di Mempawah.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80% dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN Bidang ESDM yang diperoleh melalui penilaian 1 (satu) tahap dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses. Adapun target Triwulan II sebesar 40%

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Hilirisasi - Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 dan Fase 2, serta New Smelter Aluminium di Mempawah telah terealisasi sebesar 40% atau mencapai 100% dari target Triwulan II Tahun 2026 sebesar 40% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
2. IKU-2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Hilirisasi – Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 dan Fase 2, serta New Smelter Aluminium di Mempawah	Persen	40	40	100% (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Hilirisasi – Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 dan Fase 2, serta New Smelter Aluminium di Mempawah			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Penyusunan alternatif rekomendasi atas permasalahan	Terlaksana	1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Lanjutan

	Pengembangan <i>Smelter</i> <i>Grade Alumina Refinery</i> (SGAR) Fase I dan Fase II, serta New <i>Smelter</i> Aluminium		Pengembangan Terminal Kijing Mempawah pada tanggal 13 April 2026 dengan poin pembahasan rakor antara lain: • percepatan penyelesaian PKKPR dan pendalaman alur Pelabuhan Kijing • pembentukan task force Pelindo – MIND ID untuk pengembangan Terminal Kijing • Koordinasi penyediaan lahan PLTU pendukung New Smelter Aluminium • Sinkronisasi perubahan status Terminal Kijing menjadi Pelabuhan Kijing • Percepatan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Kijing melalui penyesuaian tata ruang • Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur jalan menuju kawasan industri Kijing
--	---	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Berita Acara Rapat Koordinasi Lanjutan Pengembangan Terminal Kijing Mempawah tanggal 13 April 2026 yang disepakati oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian

Pekerjaan Umum, PT Pelindo, INALUM, Pelindo Multi Terminal, Pelindo Sinergi Lokaseva, MIND ID, Bukit Asam, dan BAI.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dilaksanakannya rapat pembahasan di dalam kantor sehingga realisasi anggaran sampai dengan TW II sebesar Rp124.202.237 atau sebesar 43% dari pagu anggaran sebesar Rp291.075.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Masih diperlukan sinkronisasi kebijakan dan percepatan penyelesaian isu lintas sektor terkait pengembangan Terminal Kijing, SGAR Fase II, dan New Smelter Aluminium.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memfasilitasi rapat koordinasi untuk menyusun rekomendasi penyelesaian permasalahan, mendorong pembentukan Task Force Pelindo–MIND ID, serta mengawal tindak lanjut penyelesaian aspek perizinan, tata ruang, dan infrastruktur pendukung.

2.3 Persentase

Efektivitas

Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pengembangan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati

Latar Belakang

Dalam menghadapi tantangan swasembada energi dan mendorong transisi energi menjadi energi bersih, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral juga melakukan pengawalan terhadap pengembangan bahan bakar nabati (biofuel) melalui Pembangunan Kilang Bioethanol yang akan dilakukan oleh PT Pertamina (persero), melalui Kilang Pertamina Internasional, Pertamina Patra Niaga, dan Pertamina New and Renewable Energy (PNRE). Penggunaan bioethanol dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, mendukung perekonomian lokal, dan meningkatkan ketahanan energi dengan mengurangi ketergantungan pada minyak bumi karena mudah diintegrasikan ke infrastruktur BBM. Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, sekaligus mendukung komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi karbon dan transisi menuju energi bersih.

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80% dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN Bidang ESDM yang

diperoleh melalui penilaian 1 (satu) tahap dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses. Adapun target Triwulan II sebesar 40%

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Bioethanol Sebagai Bahan Bakar Nabati telah terealisasi sebesar 40% atau mencapai 100% dari target Triwulan II Tahun 2026 sebesar 40% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pengembangan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati	Persen	40	40	100% (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pengembangan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil	Terlaksana	1. Menghadiri Rapat Lanjutan Panitia Antar Kementerian (PAK) pada 21 April 2026 dan

	identifikasi dan pendalaman terkait permasalahan pengembangan Bioethanol sebagai bahan bakar nabati		4 May 2026 membahas substansi perubahan regulasi pengembangan bioethanol. 2. Melaksanakan Kunjungan Lapangan dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Bioethanol pada 15 Juni 2026 untuk memperoleh data dan mengidentifikasi kendala di lapangan. 3. Menghadiri Rapat Pembahasan Lampiran Perubahan Perpres Nomor 40 Tahun 2023 pada 18 Juni 2026.
--	---	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Telah Mengikuti Sosialisasi Kepmen ESDM tentang Penahapan Pemanfaatan BBN dan Permen ESDM No. 4 Tahun 2025 Tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan BBN pada 7 April 2026 untuk memperoleh informasi terupdate terkait kebijakan yang berlaku.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dilaksanakannya rapat pembahasan di dalam kantor sehingga realisasi anggaran sampai dengan TW II sebesar Rp125.004.854 atau sebesar 43% dari pagu anggaran sebesar Rp289.820.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Berdasarkan hasil koordinasi dengan BUMN dan hasil monitoring lapangan, masih terdapat tantangan dalam pemenuhan target pengembangan bioethanol sebagai bahan bakar nabati, antara lain terkait keterbatasan ketersediaan bahan baku, kesiapan lahan, dan kapasitas produksi, sehingga diperlukan pendalaman lebih lanjut terhadap strategi pencapaian target pengembangan bioethanol nasional.
2. Implementasi ketentuan mandatori pemanfaatan bioethanol bagi badan usaha niaga BBM masih memerlukan pendalaman terkait kesiapan pelaksanaan, mekanisme pengawasan, dan pemenuhan kewajiban oleh masing-masing badan usaha.
3. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan masih terdapat beberapa data teknis dan aspek keekonomian, antara lain terkait kesiapan pasokan bahan baku, kapasitas produksi, serta Harga Jual Eceran (HJE), yang masih perlu dikaji dan divalidasi sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan III agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi lanjutan dengan Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, BP BUMN, serta BUMN terkait dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan yang mempertimbangkan kesiapan rantai pasok, ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi bioethanol nasional, serta implementasi pengembangan bioethanol secara bertahap sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
2. Mendorong pembahasan lanjutan bersama kementerian/lembaga dan badan usaha terkait mengenai mekanisme implementasi, pengawasan, serta kesiapan badan usaha dalam memenuhi ketentuan mandatori pemanfaatan bioethanol sesuai dengan regulasi yang berlaku.
3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi melalui rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga, BUMN, dan pemangku kepentingan terkait untuk melengkapi dan memvalidasi data teknis serta aspek keekonomian sebagai dasar penyempurnaan rekomendasi kebijakan.

2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Program Strategis BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait program strategis BUMN bidang energi dan sumber daya mineral. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Kebijakan yang dikoordinasikan dalam rangka mencapai Persentase Efektivitas Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan BUMN bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:

- Peningkatan peran dan pengembangan usaha BUMN bidang energi dan sumber daya mineral seperti Pertamina, PLN, Pupuk Indonesia, MIND ID.
- Peningkatan kinerja BUMN melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- Penyelesaian kendala dan tantangan pengembangan usaha BUMN di bidang energi seperti listrik, bahan bakar minyak, gas, dan pupuk serta sumber daya mineral dan batubara.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN Bidang ESDM diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80% dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN Bidang ESDM yang diperoleh melalui penilaian 1 (satu) tahap dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses. Adapun target Triwulan II sebesar 40%.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Program Strategis BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah terealisasi sebesar 40% atau mencapai 100% dari target Triwulan II Tahun 2026 sebesar 40% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Program Strategis BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Persen	40	40	100% (Memuaskan)

Kegiatan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Program Strategis BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan terkait program strategis dan rencana kerja PT Pertamina, PT PLN, PT Mind.Id dan PT Pupuk Indonesia. Pada Triwulan II 2026 telah dilaksanakan rapat bersama PT Pertamina beserta anak usahanya, PT PLN beserta anak usahanya, PT Mind.Id beserta anak usahanya, dan PT Pupuk Indonesia beserta anak usahanya.

Adapun sebagian besar isu strategis BUMN tersebut antara lain terkait dukungan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek pengembangan perusahaan yang telah direncanakan mulai dari perizinan pembangunan, pengadaan lahan, pengadaan peralatan hingga fase konstruksi proyek, terutama terkait adanya rencana pembangunan proyek baru maupun pengembangan proyek.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Program Strategis BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan atas permasalahan terkait program	Terlaksana	1. Penyelenggaraan FGD tentang Dampak Pengenaan Sanksi Rosneft terhadap Keberlanjutan GRR Tuban tanggal 28 April 2026 di Grand Mercure Kemayoran Jakarta, merekomendasikan

	strategis dan rencana kerja PT Pertamina, PT PLN, PT Mind Id, dan PT Pupuk Indonesia tahun 2026		bahwa perlu dibahas lebih lanjut mengenai potensi kerja sama ekonomi bilateral khususnya antara Indonesia dengan Rusia yang melibatkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga terkait guna memperoleh alternatif pembiayaan proyek. Selain itu, PT PRPP diharapkan agar berkomunikasi dengan tim KBRI terkait untuk pemenuhan data dan informasi yang diperlukan mengenai pengenaan sanksi dari AS oleh OCFA dalam rangka persiapan pendekatan <i>G to G</i>. 2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi terkait Potensi Kerjasama Ekonomi antara Rusia dengan Indonesia pada tanggal 26 Mei 2026 di Hotel Aston Bintaro Tangerang, yang mengusulkan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut : a. PT PRPP agar berkoordinasi dan berdiskusi lebih lanjut dengan tim Direktorat Hubungan Kerjasama Internasional OJK mengenai <i>money remittance mechanism</i> sebagai pilihan opsi pembiayaan proyek untuk jangka pendek bagi GRR Tuban. b. Opsi untuk dukungan pembiayaan proyek jangka menengah bisa dilakukan melalui skema kerjasama LCT antara Indonesia – Rusia melalui China dan rencana <i>Renminbi kliring bank</i> yang tengah dijajaki oleh Bank Indonesia. c. Pilihan opsi pembiayaan jangka panjangnya yaitu Direktorat Perizinan Perbankan OJK bersama dengan pengawas bank akan
--	--	--	--

			menyiapkan calon bank-bank di Indonesia yang dapat diakuisisi oleh CEB untuk mendukung alternatif pembiayaan antara Indonesia-Rusia termasuk proyek GRR Tuban ke depannya. d. Adanya usulan pendirian bank baru/bank <i>dedicated</i> untuk mendukung transaksi pembayaran maupun kerjasama pembiayaan dalam perdagangan antara Indonesia-Rusia masih perlu didiskusikan lebih lanjut melalui <i>benchmarking</i> dengan KBRI di India, KBRI di Turki, KBRI di Filipina maupun KBRI di Rusia. 3. Pelaksanaan Rapat dan Kunjungan Lapangan dalam rangka Monev CPE serta Pengembangan Bisnis Trading Hub dan Bunkering Hub di Batam pada tanggal 16 April 2026, dimana Terminal Pulau Sambu selain diperuntukkan sebagai terminal BBM, ke depannya juga akan diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan LNG. Dari 6 jetty eksisting yang sudah ada, hanya 3 jetty yang sampai saat ini dioperasikan untuk kegiatan bongkar muat BBM berupa <i>gas oil</i>/solar dan <i>bio oil/heavy oil</i>. Di sisi lain, terdapat 34 tangki BBM eksisting di Pulau Sambu yang mencakup antara lain 4 tangki <i>gas oil</i> dengan kapasitas 166.000 kl yang sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan 4 tangki <i>heavy oil</i> dengan kapasitas 130.000 kl telah disewa oleh <i>tenant</i>. PET telah memiliki laboratorium BBM di terminal Pulau Sambu yang sudah tersertifikasi untuk melaksanakan
--	--	--	--

			uji lab BBM berupa gasoil, bio oil, bio solar maupun produk sulfur. Saat ini ada rencana kerjasama antara PET dengan salah satu perusahaan Singapura untuk utilisasi laboratorium di Pulau Sambu menjadi berstandar internasional. Hal ini diharapkan agar ke depannya terminal BBM Pulau Sambu juga dapat memanfaatkan peluang bisnis uji lab bagi kapal-kapal bunker internasional yang melewati Selat Malaka/Pulau Sambu. Selain itu, PET juga telah memiliki fasilitas tangki bunker di Pulau Sambu namun tidak bisa dimanfaatkan untuk bisnis perdagangan (<i>trading</i>) <i>bunkering</i> mengingat PET belum memiliki izin. Adapun peluang bisnis ini baru bisa diimplementasikan jika PET bergabung dengan SHD Pertamina Patra Niaga yang telah memiliki izin operasional dimaksud. PET juga menyampaikan adanya potensi bisnis pengolahan air laut menjadi air tawar, dimana saat ini pihaknya baru menggunakan air tawar tersebut untuk kebutuhan kantor dan masyarakat setempat sehingga belum menjadi peluang bisnis tersendiri mengingat hal tersebut membutuhkan izin khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup. 4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Monev Pengembangan Green Refinery Cilacap Phase 2 pada tanggal 25 Juni 2026 di RU Cilacap, yang menyimpulkan antara lain : Untuk pemenuhan gas yang dibutuhkan RU Cilacap saat ini diusulkan berasal dari rencana pembangunan pipa gas Tegal - Cilacap yang terkoneksi dengan pipa Cisem II, terdapat
--	--	--	--

			potensi pembangunan Pipa Gas Tegal-Cilacap melalui skema pendanaan APBN apabila perhitungan keekonomian masih di atas harga keekonomian dari Pertamina (11,88 USD/MMBTU) sehingga diperlukan penyusunan evaluasi dan justifikasi keekonomian sebagai bahan pembahasan dengan Kementerian Keuangan untuk alokasi anggaran, Kemenko Perekonomian mengharapkan adanya analisa dari Pertamina grup terkait tambahan nilai tambah manfaat dari jaringan gas dan penggunaan pipa gas untuk produksi, Pertamina RU Cilacap agar dapat menyiapkan kajian penyediaan gas beserta nilai keekonomiannya untuk kemudian dapat didiskusikan lebih lanjut dengan KESDM maupun Kemenkeu. Kemenko Perekonomian akan menindaklanjuti hasil diskusi ini melalui rapat koordinasi pemenuhan gas untuk RU Cilacap dan alokasi anggaran untuk pembangunan pipa gas Tegal-Cilacap dengan melibatkan KESDM (Biro Perencanaan, Direktorat Infrastruktur Migas, Direktorat Pembinaan Program Migas, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas), Kemenkeu (Direktorat Jenderal Anggaran), Kementerian PPN/Bappenas, SKK Migas, dan Pertamina grup. 5. Pelaksanaan Rapat dan Monev terkait Permasalahan Industri Pupuk Iskandar Muda pada tanggal 29 April 2026 di Kantor Perwakilan PT Pupuk Iskandar Muda Jakarta, dimana PT. Pupuk Iskandar Muda membutuhkan
--	--	--	---

			beberapa dukungan dari pemerintah guna merealisasikan rencana pengembangan usahanya sebagai berikut : a. Dukungan penyediaan <i>back up</i> LNG sebesar 1-2 kargo/tahun selama proyek pengembangan lapangan gas potensial belum selesai guna kesinambungan produksi pupuk nasional. b. Mendorong percepatan proyek pengembangan gas di WK Gebang dan South Andaman untuk menjamin keberlanjutan pasokan gas ke Pupuk Iskandar Muda. c. Dukungan penetapan status dan pengelolaan pelabuhan eks AAF oleh PT. Pupuk Iskandar Muda secara resmi agar pelabuhan dapat digunakan secara optimal untuk kegiatan distribusi pupuk bersubsidi dan ekspor impor industri hilirisasi serta mendukung pengembangan KEK Arun.
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Penerbitan Surat Undangan FGD tentang Dampak Pengenaan Sanksi Rosneft terhadap Keberlanjutan GRR Tuban Nomor : BUM.02/47/D.I.M.EKON.3/04/2026 tanggal 24 April 2026.
2. Bahan paparan rapat terkait dampak pengenaan sanksi Rosneft terhadap keberlanjutan GRR Tuban.
3. Penerbitan Nota Dinas Laporan Hasil FGD tentang Dampak Pengenaan Sanksi Rosneft terhadap Keberlanjutan GRR Tuban Nomor : BUM.02/64/D.I.M.EKON.3/06/2026 tanggal 29 Mei 2026.
4. Penerbitan Surat Undangan Rakor terkait Potensi Kerjasama Ekonomi antara Rusia dengan Indonesia Nomor : BUM.02/53//D.I.M.EKON.3/05/2026 tanggal 22 Mei 2026.
5. Bahan paparan rapat koordinasi terkait potensi kerjasama ekonomi antara Rusia dengan Indonesia.

6. Penerbitan Nota Dinas Laporan Hasil Rakor terkait Potensi Kerjasama Ekonomi antara Rusia dengan Indonesia Nomor: BUM.02/65/D.I.M.EKON.3/06/2026 tanggal 6 Juni 2026.
7. Penerbitan Surat Nomor : B/BUM.02/21/D.I.M.EKON.3/04/2026 tanggal 6 April 2026 perihal Kunjungan Lapangan dalam rangka Monev CPE serta Pengembangan Bisnis Trading Hub dan Bunkering Hub di Batam.
8. Bahan paparan monev CPE serta pengembangan bisnis trading hub dan bunkering hub di Batam.
9. Penerbitan Nota Dinas Laporan Hasil Monev CPE serta Pengembangan Bisnis Trading Hub dan Bunkering Hub di Batam Nomor: BUM.02/54/D.I.M.EKON.3/04/2026 tanggal 29 April 2026.
10. Penerbitan Surat Undangan Rakor terkait Pengembangan Green Refinery Cilacap Phase 2 Nomor : BUM.02/60/D.I.M.EKON.3/06/2026 tanggal 17 Juni 2026.
11. Bahan paparan rakor pengembangan green refinery Cilacap phase 2.
12. Penerbitan Nota Dinas Laporan Hasil Rakor terkait Pengembangan Green Refinery Cilacap Phase 2 Nomor : BUM.02/78/D.I.M.EKON.3/07/2026 tanggal 7 Juli 2026.
13. Penerbitan Surat Nomor : B/EK.05.01/35/D.I.M.EKON.3/04/2026 tanggal 28 April 2026 perihal Monev terkait Permasalahan Industri Pupuk.
14. Penerbitan Nota Dinas Laporan Hasil Monev Pengembangan PT Pupuk Iskandar Muda Nomor : EK.05.05/59/D.I.M.EKON.3/04/2026 tanggal 30 April 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan rapat secara daring dan kerja sama pembiayaan dengan mitra BUMN sehingga realisasi anggaran sampai dengan TW II sebesar Rp364.853.462 atau sebesar 56% dari pagu anggaran sebesar Rp653.329.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terdapat perubahan struktur organisasi/manajemen pada BUMN bidang ESDM sehingga memperlambat jalannya pengambilan keputusan khususnya dalam pengembangan usaha BUMN.
2. Belum dilibatkannya negara-negara mitra sebagai *potential partner* dalam pembiayaan proyek terutama pembangunan kilang GRR Tuban.
3. Kurangnya komitmen K/L teknis dalam memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh BUMN bidang ESDM khususnya untuk pemenuhan kebutuhan gas bagi pengembangan usaha, seperti pada kegiatan usaha di kilang dan industri pupuk.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pengambilan keputusan terkait pengembangan usaha BUMN bidang ESDM sehubungan dengan adanya struktur organisasi/manajemen yang baru.
2. Penyelenggaraan rapat koordinasi serta melakukan *benchmarking* untuk memperoleh *lesson learn* maupun *best practice* dari negara-negara mitra yang dinilai

bisa menjadi potential partner untuk mendukung pembiayaan proyek BUMN bidang ESDM.

3. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan komunikasi yang lebih intens dengan K/L terkait guna memperkuat komitmen masing-masing K/L dalam mendukung kegiatan pengembangan usaha BUMN bidang ESDM.

3

Sasaran Program 3. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Produktivitas BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian indikator yaitu: Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan

Layanan

Sinkronisasi,

Koordinasi dan

Pengendalian

Kebijakan di Bidang

Pengembangan

Badan Usaha Milik

Negara Bidang

Energi dan Sumber

Daya Mineral

Latar Belakang

Sasaran strategis Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas berfokus pada tugas dan fungsi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencakup: (a) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asdep Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survei ini terdiri atas 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4 dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kategori puas. Adapun survei dilakukan pada Triwulan II dengan penilaian sepanjang semester I.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah terealisasi sebesar 3.8 dari 4 atau mencapai 120% dari target Tahun 2026 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	indeks	3 dari 4	3,9 dari 4	120%

Sepanjang periode ini, Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berusaha memberikan layanan yang baik kepada stakeholders terkait, yaitu Kementerian/Lembaga terkait dan BUMN terkait (Pertamina, PLN, Mind ID, dan Pupuk Indonesia).

Jika dilihat dari pelaksanaan atas rencana aksi pada triwulan II Tahun 2025, dapat dikatakan seluruh kegiatan dalam rencana aksi perjanjian kinerja telah terealisasi seluruhnya dan melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 120% dari target.

Layanan Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan BUMN Bidang ESDM ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, serta stakeholder terkait puas terhadap layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang dilakukan.

Realisasi triwulan II didorong oleh koordinasi yang efektif antar stakeholder terkait yang membuat indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan BUMN Bidang ESDM tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan BUMN Bidang ESDM masih terus dilaksanakan, maka diprediksikan indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian BUMN Bidang ESDM akan terus stabil sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan)

			pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan BUMN Bidang ESDM Semester I 2025	Terlaksana	Telah dilakukan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Periode Semester I Tahun 2025.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga dalam penyusunan rekomendasi yang lebih komprehensif
2. Memberikan pelayanan optimal kepada stakeholder dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dilaksanakannya rapat pembahasan di dalam kantor sehingga realisasi anggaran sampai dengan TW II sebesar Rp364.853.462 atau sebesar 56% dari pagu anggaran sebesar Rp653.329.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi yang perlu ditingkatkan Kembali antar K/L.
2. Diperlukan strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan BUMN Bidang ESDM.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Peran aktif pegawai memanfaatkan komunikasi informal dan formal untuk mendorong koordinasi dan sinkronisasi.
2. Peningkatan kualitas layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan BUMN Bidang ESDM melalui peningkatan kualitas SDM.

4

Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan oleh pencapaian indikator yaitu: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Terwujudnya tata kelola Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang baik merupakan sasaran strategis yang berfokus pada perspektif *learning and growth* dan merupakan turunan dari sasaran strategis perspektif *learning and growth* level kedeputian yakni Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Rencana Aksi Asisten Deputi terkait pemenuhan:

1. Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai
2. Tingkat Maturitas SPIP
3. Nilai SAKIP
4. Indeks Perencanaan Pembangunan
5. Tingkat Digitalisasi Arsip

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92% dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN Bidang ESDM yang diperoleh melalui penilaian 1 (satu) tahap dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses. Adapun target Triwulan II sebesar 46%.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah terealisasi sebesar 46% atau mencapai 100% dari target Triwulan II Tahun 2026 sebesar 46% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang	Persen	46	46	100% (Memuaskan)

Energi dan Sumber Daya Mineral				
-----------------------------------	--	--	--	--

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Telah disusun konsep Laporan Kinerja Triwulan II
2	Penyusunan Renja 2027	Terlaksana	Telah disusun TOR RAB Tahun 2027 sesuai pagu Indikatif yang telah disampaikan oleh Biro MKKS
3	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SRIKANDI menunjukkan peningkatan, yang tercermin dari meningkatnya jumlah dokumen yang diproses secara elektronik serta meningkatnya jumlah pengguna aplikasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang ESDM.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program kerja dan capaian kinerja di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang ESDM;

2. Penguatan koordinasi dan komunikasi dengan kementerian/lembaga, BUMN, serta pemangku kepentingan terkait dalam rangka dalam pengumpulan data, informasi, dan dokumen pendukung dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pencapaian target kinerja
3. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi seluruh pegawai di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang ESDM sebagai dasar pengelolaan kinerja individu; dan
4. Peningkatan kualitas administrasi perkantoran dan tata kelola dokumen melalui penataan arsip, penyusunan konsep surat, nota dinas, serta dokumen pendukung lainnya secara tertib dan tepat waktu.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dilaksanakannya rapat pembahasan di dalam kantor sehingga realisasi anggaran sampai dengan TW II sebesar Rp364.853.462 atau sebesar 56% dari pagu anggaran sebesar Rp653.329.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Koordinasi lintas unit memerlukan waktu untuk memperoleh data, masukan, dan persetujuan sehingga berpotensi memengaruhi ketepatan waktu penyelesaian dokumen dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pencapaian target kinerja;
2. Kelengkapan dan konsistensi data dukung yang masih perlu dikonsolidasikan dari berbagai sumber untuk mendukung penyusunan laporan kinerja dan dokumen Reformasi Birokrasi dan
3. Masih diperlukan peningkatan pemahaman dan konsistensi pemanfaatan aplikasi SRIKANDI oleh seluruh pegawai agar implementasi tata naskah dinas elektronik dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi secara intensif dengan unit kerja terkait serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap progres penyusunan dokumen untuk memastikan penyelesaian sesuai target waktu.
2. Mendorong optimalisasi pemanfaatan aplikasi SRIKANDI dalam penyelenggaraan tata naskah dinas elektronik serta melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh proses persuratan dilaksanakan sesuai ketentuan; dan
3. Melaksanakan rapat koordinasi monitoring rencana aksi RB.

Jakarta, 1 Juli 2026
Asisten Deputi Pengembangan BUMN
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral



Gede Edy Prasetya